

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



**KPU
KOTA BIMA**

Jln. Gadjah Mada, Kel. Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima - NTB
Telp. 0374.44865

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**LAKIP
TAHUN 2020**

SEKRETARIAT KPU KOTA BIMA



<https://kota-bima.kpu.go.id>



KPU Kota Bima



@KPUKotaBima



kpu kota bima kobi



kota_bima@kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2020. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, setiap unit eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri instansi pemerintah diamanatkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), oleh sebab itu sekretariat KPU Kota Bima sebagai salah satu Satker Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum juga Wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bima tahun 2020 ini merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, yang memuat kegiatan-kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2010 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai media dan informasi bagi Sekretariat KPU Kota Bima untuk menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada pemangku kepentingan, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Bima baik keberhasilan maupun kegagalannya selama tahun 2020.



Laporan Kinerja ini juga sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) dan capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020. Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana strategis 2020–2024 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi Tahun 2020.

Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian, capaian kinerja organisasi tahun 2020, analisa capaian kinerja organisasi tahun 2020 dan akuntabilitas keuangan. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dan sebagai pemicu bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugasnya di masa yang akan datang dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kota Bima.

Kota Bima, Februari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Sekretaris,



Drs. AJMAH

NIP. 19671231 199803 1 088



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	2
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban.....	3
Struktur Organisasi	5
Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
Rencana Strategis.....	9
Pernyataan Visi.....	9
Pernyataan Misi.....	9
Tujuan.....	10
Sasaran Strategis.....	11
Indikator Kinerja Utama.....	11
Program dan Kegiatan.....	13
Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	14
Rencana Kinerja Tahun 2020	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
Evaluasi Kinerja.....	23
Analisa Keuangan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	41
Tinjauan Umum.....	41
Hambatan dan Masalah.....	42
Saran.....	43



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Kota Bima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berkewajiban mendukung secara teknis dan administratif Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya tersebut diperlukan akuntabilitas yang merupakan kewajiban dari suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Sekretariat KPU Kota Bima menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud pengembangan dan pertanggungjawaban yang tepat dan dapat diterima semua pihak untuk mencapai sasaran strategis dan terwujudnya visi dan misi. Laporan Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2020 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kota Bima pada Tahun Anggaran 2020 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas.

Pada tahun 2020 Sekretariat KPU Kota Bima telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 9 (sembilan) indikator kinerja. Pada umumnya pengukuran atas capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat Capaian Kinerja tahun 2020 telah mencapai target capaian kinerja dari indikator sasaran dan indikator kinerja utama. Hal ini menggambarkan capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Bima dapat dikategorikan CUKUP BERHASIL. Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis dibutuhkan dana sebesar Rp. 3.418.168.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.069.532.875,- atau 89,8 persen dari jumlah pagu yang dianggarkan, tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari sekretariat KPU Kota Bima dan komitmen bersama sepanjang tahun 2020.

Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai Sekretariat KPU Kota Bima terus menerus melakukan perbaikan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut tentunya bukan perkara yang mudah maka dari itu diperlukan langkah-langkah berikut :

- Langkah pertama : Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah kinerja
- Langkah Kedua : Menjelaskan dampak masalah
- Langkah Ketiga : Menganalisa penyebab masalah
- Langkah Keempat : Mendefinisikan standar kinerja yang diharapkan
- Langkah Kelima : Menggali gagasan untuk menetapkan solusi
- Langkah Keenam : Menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut



Akhirnya dengan laporan ini diharapkan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Bima pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian secara umum, terhadap beberapa capaian utama kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel i.1 berikut ini :

Tabel i.1
Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bima Tahun 2020

NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan reviu laporan keuangan (3355.003)	100	94,48	94,48
2	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)	95	88,29	88,29
3	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)	95	93,20	93,20
4	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	100	69,70	69,70
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	100	82,27	82,27
6	Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)	100	63,72	63,72
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)	100	93,58	93,58
8	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)	95	91,42	91,42
9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)	100	94,39	94,39



NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
10	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)	100	82,89	82,89
11	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)	100	49,80	49,80
12	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)	0	94,71	94,71
13	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)	100	80,37	80,37
14	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	100	28,33	28,33
15	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	100	0	0
16	Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)	100	51,35	51,35
17	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)	100	31,93	31,93
18	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	100	85,83	85,83
19	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	100	90,21	90,21



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat KPU Kota Bima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU yang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban satker KPU Kota Bima secara teknis dan administratif sebagai wujud pelaksanaan dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi atas Pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan KPU melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada tingkat satuan kerja yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Renstra KPU yang telah dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama, penyusunan Rencana Kerja Tahunan KPU, penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, dan Pelaporan Kinerja untuk selanjutnya direviu dan dievaluasi oleh APIP KPU.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bima merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan selama Tahun 2020 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bima.



Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja Sekretariat KPU Kota Bima;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja Sekretariat KPU Kota Bima ;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan Sekretariat KPU Kota Bima;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan Sekretariat KPU Kota Bima pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kota Bima sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kota Bima sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja;
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L.

C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 88 berikut adalah tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur dan Bupati.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mempunyai tugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Bima;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Bima;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Bima;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bima;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Bima;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Bima;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Bima;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima; dan
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berkewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.



Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pasal 181 menyatakan bahwa susunan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian, yaitu dengan penjelasan berikut.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Data;
2. Subbagian Hukum;
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
4. Subbagian Umum, Logistik dan Keuangan. Adapun tugas masing-masing Subbagian yaitu :
 - a. Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu;
 - b. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye;
 - c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bima, pengisian anggota DPRD Kota Bima pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kota Bima, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima dan penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih;
 - d. Subbagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kota Bima adalah Satker yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Eselon III A), bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Bima dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag (Eselon IV A) dan para staf pelaksana. Jenis kepegawaian di Sekretariat KPU Kota Bima terdiri dari Pegawai Organik dan Pegawai Daerah yang dipekerjakan serta Pegawai Honorer.

Berikut gambaran sumber daya manusia yang dijelaskan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Posisi Pegawai Menurut Golongan (per 31 Desember 2020)

No	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	10
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
5.	Honorer	10
Jumlah		26

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Total jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai) pada Sekretariat KPU Kota Bima adalah 26 (dua puluh enam), dan sesuai dengan adanya surat keputusan Sekjen KPU RI bahwa pegawai sekretariat KPU Kab/Kota berjumlah 16 orang maka KPU Kota Bima sampai 31 Desember 2020 jumlah PNS kurang dari 16 orang karena pada Bulan Desember 2020 terdapat 1 orang pegawai PNSD yang telah mencapai masa purna tugas, dijelaskan pada tabel 1.2 dibawah ini.



Tabel 1.2
Data Pegawai Menurut Jabatan (per 31 Desember 2020)

No	Jabatan	Jumlah	Jumlah DPK	Jumlah Organik
1.	Sekretaris	1	-	1
2.	Kasubag	4	3	1
3.	Pelaksana	11	3	7
Jumlah		16	7	9

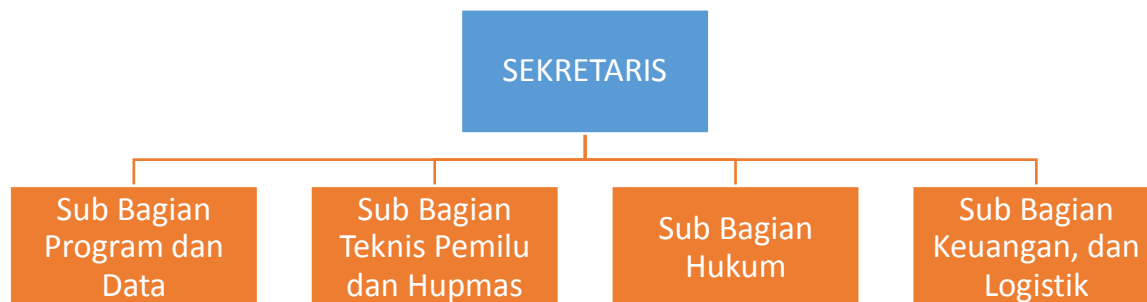
Sedangkan data pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Data Pegawai Menurut Jabatan (per 31 Desember 2020)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S1	9
2.	D3	2
3.	SMA	5
4.	SMP	0
5.	SD	0
Jumlah		16

Berikut gambaran Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bima seperti tampak dalam tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan dan menginformasikan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Bima selama tahun 2020, capaian kinerja (performance results) diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) dan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Bima tahun 2020 disusun dalam masing-masing bab sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2020, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Renstra KPU Kota Bima merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra KPU Kota Bima merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan KPU Kota Bima dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra KPU merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

Uraian ringkas komponen Perencanaan Strategis KPU Kota Bima Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

B. PERNYATAAN VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengacu pada Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, dan akuntabel.
Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

C. PERNYATAAN MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kota Bima sekaligus memberikan arah

dan batasan-batasan proses penyampaian tujuan, maka misi KPU Kota Bima adalah sebagai berikut :

- a. Membangun sumber daya manusia (SDM) KPU Kota Bima yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan bimbingan dan pendidikan secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- e. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,serta aksesable.

D. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan.. Tujuan tersebut berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu spesifik, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki Orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam jangka waktu sampai Tahun 2020, yaitu:

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kota Bima yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, tranparan, akuntabel dan aksesable.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Sekretariat KPU Kota Bima dengan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas dan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Meningkatnya kapasitas Penyelenggara Pemilu;
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan;
- d. Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten;
- e. Meningkatnya penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan melalui Teknologi Informasi;
- f. Meningkatnya pengelolaan dan pendistribusian logistik yang baik melalui Teknologi Informasi;

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kota Bima merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat dan daya guna yang menunjukkan peran utama Sekretariat KPU Kota Bima yang berperan memberikan dukungan teknis administratif bagi Komisioner KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Indikator kinerja utama Sekretariat KPU Kota Bima merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung dan perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) internal Sekretariat KPU Kota Bima.

Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama Sekretariat KPU Kota Bima dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kota Bima

No.	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis			
1.	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)	Total Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan	LRA E-Rekon LPPA
Sasaran 2 : Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1.	Persentase (%) Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Subag Hukum
		Terlaksananya Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Subag Teknis



G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang ada dalam Renstra, Sekretariat KPU Kota Bima mengacu pada Program KPU Republik Indonesia yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi KPU yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi organisasi KPU secara keseluruhan dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi KPU untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program KPU tersebut terdiri dari:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (Program 076.01.01). Program 01 bersifat generik antar K/L yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan teknis, operasional dan administrasi;
- b. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (Program 076.01.06).

Baik program dukungan (Program 076.01.01) maupun program teknis (Program 076.01.06) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh satuan kerja di lingkungan KPU, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Bima dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2020 konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, yaitu terdapat 5 (lima) kegiatan di program 076.01.01 yaitu :

- a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355);
- b. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu (3356);
- c. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data (3357);
- d. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360);
- e. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361).



Sementara untuk kegiatan di Program 076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (3363);
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364).

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sebagai unit kerja Eselon III Sekretariat KPU Kota Bima dalam mempertanggung jawabkan kinerja menggunakan indikator kinerja utama/keluaran (output), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa untuk Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan menggunakan Indikator Keluaran (output).

Sekretariat KPU Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja menyelaraskan dengan unit eselon II KPU RI dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang dimiliki sehingga dapat memenuhi variabel spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan berkelanjutan (SMART). Indikator Kinerja itu digunakan sebagai instrumen untuk mengukur Perjanjian Kinerja Satker yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan, hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bima adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat dan valid	1 Laporan
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%
2.	Tersedianya data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
3.	Terlaksananya manajemen perencanaan dan data	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2021	100%
		Terkelolanya Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2020	100%
		Tersusunnya Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024	100%
4.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Tersusunnya laporan kinerja Tahun 2019	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU)	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	100%
		Terbayarnya langganan daya dan jasa	100%
		Terpeliharanya gedung dan gudang kantor KPU Kota Bima	100%
		Tersedianya pakaian dinas pegawai dan tenaga pendukung	100%
		Terbayarnya honorarium tim pengelola keuangan	100%
6.	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2019	Terlaksananya rapat koordinasi evaluasi LAKIP tahun 2019	100%
7.	Tersusunnya Laporan hasil reviu Laporan Keuangan.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	0%
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kota Bima	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8.	Meningkatnya kualitas penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesain sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Terdokumentasinya produk hukum KPU Kota Bima	100%
		Terlaksananya bimbingan teknis pemasangan JDIH di tingkat Kota Bima	100%
9.	Terfasilitasinya pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan Penggantian Antar Waktu (PAW)	Tersosialisasinya Pilkada Serentak 2020	100%
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Bima	100%
		Terpublikasinya Data dan Informasi Pemilu	100%
		Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik	100%
		Tersedianya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	100%
		Terlaksananya digitalisasi data untuk pengembangan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%



I. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kota Bima Tahun 2020 terdapat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat
Kpu Kota Bima Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat dan valid	1 Laporan
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	100%
2.	Tersedianya data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	100%
3.	Terlaksananya manajemen perencanaan dan data	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2021	100%
		Terkelolanya Program dan Kegiatan serta Anggaran TA 2020	100%
		Tersusunnya Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024	100%
4.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Tersusunnya laporan kinerja Tahun 2019	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor (KPU)	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	100%
		Terbayarnya langganan daya dan jasa	100%
		Terpeliharanya gedung dan gudang kantor KPU Kota Bima	100%
		Tersedianya pakaian dinas pegawai dan tenaga pendukung	100%
		Terbayarnya honorarium tim pengelola keuangan	100%
6.	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2019	Terlaksananya rapat koordinasi evaluasi LAKIP tahun 2019	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7.	Tersusunnya Laporan hasil revidi Laporan Keuangan.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/revidi internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	0%
		Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kota Bima	100%
8.	Meningkatnya kualitas penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesain sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Terdokumentasinya produk hukum KPU Kota Bima	100%
		Terlaksananya bimbingan teknis pemasangan JDIH di tingkat Kota Bima	100%
9.	Terfasilitasinya pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan Penggantian Antar Waktu (PAW)	Tersosialisasinya Pilkada Serentak 2020	100%
		Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Bima	100%
		Terpublikasinya Data dan Informasi Pemilu	100%
		Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik	100%
		Tersedianya dokumen teknis Pemilu Legislatif,	100%



		Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
		Terlaksananya digitalisasi data untuk pengembangan Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada dasarnya Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Capaian Sekretariat KPU Kota Bima di tahun 2020 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kota Bima.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Cara pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta membandingkan realisasi capaian kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target sampai dengan akhir tahun Renstra. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab, sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Bima Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2020 sebesar 89,80%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Bima dikategorikan “CUKUP BERHASIL” dalam menempuh sasaran strategis dalam indikator kinerja.



Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Ordinal dengan Kelompok Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak

B. EVALUASI KINERJA

Sekretariat KPU Kota Bima mempunyai Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai bagian dari pertanggung jawaban kinerja selama periode waktu tertentu, sasaran ini meliputi beberapa hal antara lain “Terwujudnya data pemilih terkini” yang diperoleh dari menghitung persentase KPU Kota Bima yang melakukan pemutakhiran data pemilih dibandingkan total pemutakhiran data yang sudah dilakukan. Pengukuran sasaran “Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan” didapatkan dengan cara menghitung persentase jumlah output yang ditindak lanjuti dibandingkan dengan total output. Pengukuran sasaran Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU dengan menghitung jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dibandingkan dengan total sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik. Untuk pengukuran sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten” didapatkan dari persentase membandingkan jumlah pegawai yang memiliki standar kompetensi dengan total pegawai.

Pengukuran sasaran “Tersusunnya Keputusan KPU KPU Kota Bima serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” didapatkan dengan cara persentase jumlah keputusan yang dihasilkan, diharmonisasi dan didokumentasi secara tepat waktu dibandingkan dengan total keputusan. Sedangkan untuk pengukuran sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU KPU

Kota Bima” diperoleh dengan jumlah laporan yang dihasilkan sesuai prosedur, tepat waktu dan komprehensif.

Berikut adalah target dan realisasi outcome pencapaian kinerja yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.1
Formulir Pengukuran Kinerja

NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan reviu laporan keuangan (3355.003)	100	94,48	94,48	BERHASIL
2	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)	95	88,29	88,29	CUKUP BERHASIL
3	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)	95	93,20	93,20	BERHASIL
4	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	100	69,70	69,70	KURANG BERHASIL
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	100	82,27	82,27	CUKUP BERHASIL



NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
6	Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)	100	63,72	63,72	KURANG BERHASIL
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)	100	93,58	93,58	BERHASIL
8	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)	95	91,42	91,42	BERHASIL
9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)	100	94,39	94,39	BERHASIL
10	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)	100	82,89	82,89	CUKUP BERHASIL
11	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)	100	49,80	49,80	TIDAK BERHASIL
12	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)	0	94,71	94,71	BERHASIL
13	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)	100	80,37	80,37	CUKUP BERHASIL
14	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	100	28,33	28,33	TIDAK BERHASIL



NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
15	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	100	0	0	TIDAK BERHASIL
16	Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)	100	51,35	51,35	KURANG BERHASIL
17	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)	100	31,93	31,93	TIDAK BERHASIL
18	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	100	85,83	85,83	CUKUP BERHASIL
19	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	100	90,21	90,21	CUKUP BERHASIL

1. Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan revidi laporan keuangan (3355.003)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	BERHASIL
		100%	94,48%	94,48%	

Untuk kegiatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan belum mencapai target 100% tetapi telah cukup berhasil dan telah dicapai target 1 laporan dengan persentase 94,48%, kegiatan penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Pelaporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ditujukan untuk memastikan tersusunnya laporan keuangan setiap periode pelaporan. Penyusunan laporan tersebut perlu memperhatikan data-data keuangan dan barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya oleh instansi terkait.

Sekretariat KPU Kota Bima telah menyusun Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan untuk tahun anggaran 2020 baik berbasis kas maupun basis akrual untuk UAKPA dengan memperhatikan hasil rekonsiliasi dengan KPPN maupun KPKNL dan laporan tersebut telah di sampaikan ke UAPA-W

2. Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)	1 Laporan 100%	1 Laporan 88,29%	100% 88,29%	CUKUP BERHASIL

Untuk kegiatan Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran belum mencapai target 100% tetapi telah cukup berhasil dan telah dicapai target 1 laporan dengan persentase 88,29%, kegiatan ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahun 2020 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Sekretariat KPU Kota Bima telah menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran selama 12 bulan baik untuk anggaran Rutin maupun anggaran Tahapan Pemilu 2020 selain itu KPU Kota Bima juga menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan disampaikan melalui simonikaV2.kpu.go.id.

3. Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	1 Layanan	1 layanan	100%	BERHASIL
		100%	93,20%	93,20%	

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik berpedoman pada kebijakan dan implementasi dalam bentuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 Orang untuk 12 bulan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sedangkan untuk Ketua dan Anggota KPU Kota Bima dibayarkan uang kehormatan selama 12 bulan dan uang kehormatan ke-13 dan 14 adapun persentase capaian kegiatan sebesar 93,20%.

4. Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	KURANG BERHASIL
		100%	69,70%	69,70%	

Jenis logistik yang harus diadakan dalam Pemilihan Umum didasarkan pada kebutuhan disetiap tingkatan Badan penyelenggaran, karena itu perhitungan jumlah setiap jenis logistik didasarkan pada jumlah Badan Penyelenggaran, jumlah peserta Pemilu dan jumlah Pemilih.

Pengadaan logistik Pemilu Tahun 2020 dilaksanakan disetiap tingkatan mulai dari KPU, KPU Provinsi sampai dengan KPU Kabupaten Kota. Kegiatan yang dilakukan adalah Perencanaan Kebutuhan logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu dimana diimplementasikan dalam bentuk fasilitasi Perencanaan kebutuhan dan Anggaran logistik pemilu dan Pilkada serta melakukan Koordinasi

dengan KPU Provinsi dan KPU RI mengenai perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggarannya.

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan berpedoman pada petunjuk dan koordinasi yang baik dengan data dan waktu yang ada serta mengacu pada aturan yang ada seperti Peraturan, Keputusan, Surat dan aturan lainnya yang dikeluarkan oleh KPU RI dengan analisis yang baik tentang jumlah kebutuhan logistik KPU Kota Bima.

5. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen 100%	1 Dokumen 82,27%	100% 82,27%	CUKUP BERHASIL

Untuk mencapai target kegiatan Dokumen Perencanaan Anggaran Sekretariat KPU Kota Bima melaksanakan tahapan kegiatan antara lain meliputi :

- melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 berdasarkan RKP 2020;
- Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
- Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Renja dan RKA K/L dengan KPU Provinsi.

Kegiatan penyusunan penyampaian dokumen perencanaan anggaran sebanyak 1 dokumen sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 realisasi untuk penyusunan rencana kerja anggaran adalah sebesar 82,27% dengan capaian pembuatan Laporan yang sesuai target. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong CUKUP BERHASIL.

6. Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100%	KURANG BERHASIL
		100%	63,72%	63,72%	

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 kegiatan tersebut diatas dengan target 1 laporan dan persentase sebesar 63,72% masuk kategori KURANG BERHASIL karena adanya belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yang tidak direalisasikan secara optimal sebesar 44,85%. Sedangkan untuk belanja bahan terealisasi optimal sebanyak 95,69%.

7. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	BERHASIL
		100%	93,58%	93,58%	

Kegiatan pemutakhiran data pemilih tahun 2020 adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2020. Pelaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2020 dalam jaringan (Darling) melalui aplikasi zoom meeting yang dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dimulai dari rekapitulasi periode Januari-april sampai dengan rekapitulasi periode bulan Desember tahun 2020. Realisasi anggaran sebesar 93,58% dengan kategori BERHASIL.

8. Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	BERHASIL
		100%	91,42%	91,42%	

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan :

1. Melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN);
2. Penatausahaan BMN (melaksanakan pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN);
3. Menyusun laporan Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang untuk semester I dan Semester II Tahun 2020.

Realisasi penggunaan anggaran untuk penyusunan dokumen pengelolaan barang milik Negara sebesar 91,42% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai target indikator kinerja.

9. Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	BERHASIL
		100%	94,39%	94,39%	

Pengadaan peralatan fasilitasi perkantoran dengan target 1 layanan dan realisasi penggunaan anggaran mencapai 94,39% pencapaian kegiatan ini tergolong kategori

BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

10. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai	12 Layanan	12 Layanan	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	82,89%	82,89%	

Kegiatan layanan operasional perkantoran dilaksanakan selama 1 tahun dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020, anggaran ini dialokasikan untuk pembayaran honorarium, pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin. Berdasarkan persentase realisasi anggaran sebesar 82,89% dari target kinerja, maka pencapaian kinerja kegiatan ini masuk kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Pada kegiatan ini anggaran tidak dapat direalisasikan dengan optimal, karena untuk langganan daya dan jasa masih terdapat banyak sisa anggaran, selain itu anggaran Honorarium untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak dibayarkan karena PPK dirangkap oleh KPA, sedangkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dirangkap oleh Kasubag Umum.

11. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	49,80%	49,80%	

Kegiatan penyusunan laporan hasil evaluasi LAKIP tahun 2020 dengan capaian realisasi sebanyak 49,80% dikategorikan TIDAK BERHASIL karena ada sisa anggaran

yang tidak digunakan yaitu Belanja Bahan dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.

12. Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	1 Layanan	1 Layanan	100%	BERHASIL
		100%	94,71%	94,71%	

Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, KPU Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan;
- Mengumpulkan data dan informasi mengenai daftar Barang Milik Negara;
- Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
- Mengikuti reviu atas laporan keuangan di KPU Provinsi NTB;
- Membuat laporan SPIP setiap bulannya.

Kegiatan penyediaan 1 layanan reviu laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah selama 12 bulan, dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Realisasi penggunaan anggaran untuk reviu laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah sebesar 94,71% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan mencapai target indikator kinerja.



13. Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	80,37%	80,37%	

Kegiatan pengolahan Data dan Informasi serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Bima telah mencapai target kinerja dengan capaian sebesar 80,37% kategori CUKUP BERHASIL.

14. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020	1 Layanan	1 Layanan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	28,33%	28,33%	

Berdasarkan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) sebesar 28,33% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target indikator kinerja.



15. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	0%	0%	

Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 0% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan bukan tidak mencapai target indikator kinerja tetapi pada Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tidak terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bima sehingga anggaran tersebut tidak direalisasikan.

16. Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu	1 Edisi	1 Edisi	100%	KURANG BERHASIL
		100%	51,35%	51,35%	

Kegiatan Publikasi Informasi Pemilu dengan kode akun 3364.005 yang seharusnya digunakan untuk publikasi publik tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 setelah revisi anggarannya beberapa pos anggaran dipindahkan ke kode akun ini dan 99% anggarannya digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan total penggunaan anggaran sebesar 51,35% dengan kategori KURANG BERHASIL.

17. Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	1 Satker	1 Satker	100%	TIDAK BERHASIL
		100%	31,93%	31,93%	

Kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana KPU Kota Bima tidak terlaksana maksimal karena situasi sedang pembatasan sosial pandemi COVID-19.

Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 31,93% dengan capaian pelayanan yang belum sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori TIDAK BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai target indikator kinerja.

18. Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	85,83%	85,83%	

Kegiatan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada dilaksanakan dari bulan Januari sampai September 2020 dengan target 1 dokumen. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini

adalah sebesar 85,83% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target indikator kinerja.

19. Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1 Satker	1 Satker	100%	CUKUP BERHASIL
		100%	90,21%	90,21%	

Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana edukasi kepemiluan bagi masyarakat harus terus dikembangkan, baik dari sisi aktivitas maupun bangunannya. Dari aspek bangunan, keberadaan materi/alat peraga sebagai sumber informasi bagi pemilih harus terus diperbarui kontennya. Tentunya dengan kelengkapan berbagai materi/alat peraga tersebut bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang berkunjung dan belajar kepemiluan di Rumah Pintar Pemilu

Dalam rangka pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Lawata Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :

- Melakukan pembaharuan materi dan alat peraga Rumah Pintar Pemilu;
- Mencetak poster, brosur dan flayer tentang Pemilu;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pengadaan penambahan peralatan/alat peraga RPP;
- Melaksanakan kegiatan RPP In dan RPP Out ke Sekolah Menengah Atas se Kota Bima dengan segmen pemilih pemula.

Kegiatan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu ini meliputi kegiatan rumah pintar pemilu selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020 dengan target 1 satker. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan ini sebesar 90,21% dengan capaian pelayanan yang sesuai target yang dibuat setiap bulannya. Berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong kategori

CUKUP BERHASIL sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

C. ANALISA KEUANGAN

KPU Kota Bima memiliki DIPA dengan Pagu sebesar Rp. 3.418.168.000,- yang berasal dari APBN berdasarkan Revisi ke 7 (tujuh) DIPA KPU Kota Bima Nomor : SP DIPA-076.01.2.658262/2020 Tanggal 12 November 2020;

Pada tahun 2020, prosentase penyerapan anggaran yang berasal dari APBN murni adalah sebesar adalah sebesar :

Pagu : Rp 3.418.168.000,-
 Realisasi : Rp 3.069.532.875,-
 Penyerapan : (Realisasi/Pagu) x 100 % = 89,80 %

Rincian anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sesuai tabel dibawah ini :

Tabel.3.3

Tabel Rincian Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tingkat ketepatan dan Tertib administrasi pelaksanaan rewiu laporan keuangan (3355.003)	20.978.000	19.820.000
2	Tingkat ketepatan KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (3355.007)	12.314.000	10.872.600
3	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan,gaji dan tunjangan PNS KPU (3355.994)	2.171.662.000	2.023.891.493
4	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan (3356.008)	12.460.000	8.685.000



No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.001)	53.775.000	44.242.651
6	Tersedianya laporan pelaksanaannya kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)	2.624.000	1.672.000
7	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)	9.970.000	9.329.500
8	Persentase pengadministrasian dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Laporan Persediaan dan SIMAK BMN (3360.010)	4.600.000	4.205.200
9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Internal perkantoran (3360.951)	500.000.000	471.946.462
10	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai (3360.994)	435.496.000	360.975.865
11	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004)	743.000	370.000
12	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan/reviu internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran (3361.005)	23.436.000	22.195.200
13	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)	19.200.000	15.430.800
14	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pilkada serentak 2020 (3364.002)	1.500.000	425.000
15	Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	200.000	0



No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
16	Terfasilitasinya Publikasi Informasi Pemilu (3364.005)	111.610.000	57.315.404
17	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana (3364.007)	27.000.000	8.620.000
18	Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.030)	600.000	515.000
19	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)	10.000.000	9.020.700
TOTAL		3.418.168.000	3.069.532.875



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya dengan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota Bima pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat (*civil society*).).

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bima antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK (Laporan Keuangan)



pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;

5. Mengajak Penyelenggaraan Pemilu untuk selalu terbuka (jujur) serta berkeadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

B. HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan yang dihadapi Sekretariat KPU Kota. Bima pada tahun 2020 antara lain:

1. Terdapatnya beberapa kegiatan yang sifatnya identisial sehingga diperlukan penambahan anggaran dengan cara KPU Kabupaten/Kota melakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran yang ada berdasarkan surat perintah/persetujuan dari KPU RI;
2. Adanya anggaran yang belum terealisasi secara maksimal karena kendala aturan, seperti biaya perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada panggilan dan anggaran meeting fullboard yang tidak digunakan karena KPU Kota Bima sering melaksanakan kegiatan di Aula Kantor KPU Kota Bima dan dalam jaringan (Daring) Zoom Meeting;
3. Sering terjadi perubahan (Penambahan/Pengurangan) DIPA yang secara signifikan pada akhir tahun anggaran sehingga berpengaruh terhadap Kinerja dan realisasi anggaran.



C. SARAN

Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU Kota Bima adalah :

1. Melakukan perbaikan terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran agar dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan Mutu Sumber daya manusia terutama pegawai KPU Kota Bima.

Demikian LAKIP Sekretariat KPU Kota Bima Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada publik, dan stakeholders sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kota Bima, Januari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Sekretaris,



Drs. A J M A H

*Nip : 19671231 199803 1 088

